



Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bekasi

Wahidin Septa Zahran

Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Korespondensi penulis: septazahran65@gmail.com

Abstract. *This study aims to measure the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in improving the welfare of poor households in Bekasi Regency. Using a descriptive qualitative approach, the study focuses on an in-depth understanding of the perceptions and experiences of program beneficiaries. Data was collected through both closed and open-ended questionnaires distributed to 60 respondents, consisting of 50 Beneficiary Families (KPM) and 10 social facilitators. Data analysis was conducted using quantitative descriptive methods for the closed questionnaires, and thematic analysis for the open-ended responses and document study. The results show that more than 75% of respondents felt a positive impact in the field of education, while 72% regularly accessed health services such as Posyandu. Economically, 68% of respondents stated that the PKH assistance helped meet their basic needs, although it was not sufficient for long-term needs. Regarding implementation, 80% of respondents expressed satisfaction with the social facilitation provided, although administrative procedures and limited access in remote areas remain challenges. The conclusion of this study indicates that PKH has a significant social impact on poor households. However, the program's effectiveness still needs improvement through streamlined administrative processes, adjustment of the aid amount, and greater attention to hard-to-reach areas so that the program's benefits can be felt more evenly and sustainably.*

Keywords: Bekasi, Family Hope Program, Poor Households, Public Policy, Social Welfare

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di Kabupaten Bekasi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap persepsi dan pengalaman penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui angket tertutup dan terbuka yang disebarakan kepada 60 responden, terdiri dari 50 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 10 pendamping sosial. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk angket tertutup, serta tematik untuk angket terbuka dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 75% responden merasakan dampak positif dalam bidang pendidikan, sementara 72% responden rutin mengikuti layanan kesehatan seperti Posyandu. Di sisi ekonomi, sebanyak 68 % responden menganggap bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan dasar, meskipun belum mencukupi untuk kebutuhan jangka panjang. Dari sisi pelaksanaan, sebanyak 80 % responden merasa puas terhadap pendampingan sosial, namun prosedur administratif dan keterbatasan akses di daerah terpencil masih menjadi kendala. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak sosial yang signifikan bagi rumah tangga miskin, namun efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui penyederhanaan administrasi, penyesuaian jumlah bantuan, dan perhatian lebih terhadap wilayah yang sulit dijangkau agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kabupaten Bekasi, Kesejahteraan, Keluarga Miskin, Metode Kualitatif Deskriptif, Program Keluarga Harapan

1. PENDAHULUAN

Kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural merupakan dua tantangan utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan (Maulana, 2023). Keduanya tidak hanya mencerminkan ketidakmerataan hasil pembangunan, tetapi juga menjadi indikator lemahnya keadilan sosial dalam distribusi sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Rahman, 2017). Ketika ketimpangan sosial semakin melebar, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk kemiskinan absolut, melainkan juga muncul dalam wujud kemiskinan multidimensional

yang mencakup deprivasi dalam berbagai aspek kehidupan dasar manusia. Di Indonesia, isu ini menjadi sangat krusial mengingat negara ini merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk miskin yang signifikan, terutama di wilayah perkotaan dan pinggiran kota yang menjadi episentrum migrasi dan pertumbuhan ekonomi, belum lagi pengaruh dari pengangguran terbuka yang semakin memperbesar gap antar status sosial (Ningrum, 2017). Pemerintah, dalam merespons kompleksitas persoalan ini, telah mengembangkan berbagai kebijakan sosial, termasuk program bantuan sosial bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dirancang sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial nasional yang bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Nuraida, 2019; Amanda, 2022).

Secara konseptual PKH mengadopsi pendekatan *conditional cash transfer* (CCT) yang sebelumnya telah terbukti efektif di berbagai negara Amerika Latin seperti Brasil dan Meksiko (Jaka Sriyana et al, 2021). Dalam pendekatan ini, bantuan tunai diberikan kepada rumah tangga miskin dengan syarat-syarat tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil serta balita. Wahyudi et al (2016) menyatakan bahwa tujuan jangka pendeknya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat fondasi ekonomi keluarga melalui perubahan perilaku sosial yang lebih produktif. Kedua tujuan ini sama-sama berperan penting untuk perekonomian keluarga.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji dalam konteks implementasi PKH. Karena terletak di kawasan metropolitan Jabodetabek dan dikenal sebagai salah satu pusat industri nasional, Kabupaten Bekasi mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam dua dekade terakhir (Adeng, 2014). Namun demikian laju industrialisasi yang tinggi tidak serta-merta menghapus kesenjangan sosial yang terjadi. Masih terdapat bukti kemiskinan di berbagai kecamatan, terutama di wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas sosial dasar secara memadai. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan: di satu sisi kemajuan ekonomi, di sisi lain ketimpangan kesejahteraan yang terus membesar. Kondisi ini sejalan dengan temuan Abdussamad et al. (2023), yang menyoroti bagaimana kemiskinan tetap menjadi permasalahan serius meskipun berbagai program pembangunan telah dijalankan

Program PKH telah diluncurkan di Kabupaten Bekasi sejak lebih dari satu dekade lalu dan menjangkau ribuan rumah tangga sasaran (Kusuma et al, 2024). Namun, efektivitas program ini dalam konteks lokal masih menjadi pertanyaan yang memerlukan kajian ilmiah

yang lebih mendalam. Beberapa studi terdahulu, baik secara nasional maupun lokal, menyebutkan bahwa PKH mampu meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak dan menurunkan angka putus sekolah, serta meningkatkan kunjungan ke fasilitas kesehatan dasar (Beni & Manggu, 2020; Setyawardani et al, 2020; Wahyuni et al, 2023). Namun demikian hasil-hasil tersebut tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan dalam memberdayakan ekonomi rumah tangga miskin secara berkelanjutan. Tantangan lain juga muncul dalam hal teknis pelaksanaan, seperti rendahnya kapasitas pendamping sosial, keterbatasan anggaran operasional, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi.

Sebagai suatu kebijakan publik, keberhasilan PKH tidak semata-mata dapat diukur dari tersalurkannya bantuan, melainkan dari sejauh mana program ini mampu mendorong perubahan yang berkelanjutan dalam perilaku dan kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat. Dalam konteks ini, efektivitas program memerlukan ukuran yang lebih holistik, yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa beberapa keluarga penerima manfaat mengalami peningkatan taraf hidup secara signifikan, sementara yang lain tetap berada dalam lingkaran kemiskinan yang sama, meskipun telah bertahun-tahun menerima bantuan. Terdapat indikasi bahwa ketergantungan terhadap bantuan, tanpa disertai intervensi pemberdayaan ekonomi yang memadai, justru menciptakan pola pikir pasif dan kurang produktif. Hal ini sejalan dengan kritik serta dilema yang dilontarkan masyarakat bahwa program serupa kurang memberikan kemnaidrian pada masyarakat dan tidak mengentaskan akar kemiskinan (Haliim & Hakim, 2024). Karenanya evaluasi terhadap pelaksanaan PKH di Kabupaten Bekasi menjadi sangat relevan, terutama untuk melihat aspek keberlanjutan dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat miskin.

Penelitian ini sebagai upaya untuk mengisi celah kajian dalam literatur kebijakan sosial, khususnya mengenai implementasi program bantuan sosial bersyarat di daerah urban-industri seperti Kabupaten Bekasi. Studi ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin, dengan indikator-indikator yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; serta (2) mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun dinamika sosial di lapangan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi di mana individu dan kelompok masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal secara layak (Rahman, 2017). Dalam perspektif kebijakan publik, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari upaya negara dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga negara (Nuraida, 2019).

Konsep Conditional Cash Transfer (CCT)

PKH mengadopsi pendekatan *conditional cash transfer* (CCT), yaitu pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan investasi dalam modal manusia seperti pendidikan dan kesehatan (Jaka Sriyana et al., 2021). Model CCT telah diterapkan secara luas di negara-negara seperti Brasil dan Meksiko dan terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan jangka panjang (Wahyudi et al., 2016). Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Implementasi PKH di Indonesia

PKH pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2007 dan menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial nasional. Studi oleh Beni & Manggu (2020) menyatakan bahwa PKH mampu meningkatkan partisipasi sekolah dan akses layanan kesehatan, meskipun masih terdapat kendala dalam teknis pelaksanaan, seperti kapasitas pendamping dan monitoring program. Setyawardani et al. (2020) juga menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Evaluasi Efektivitas Program Bantuan Sosial

Efektivitas suatu program bantuan sosial dapat dilihat dari dua dimensi: kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, indikator seperti peningkatan angka partisipasi sekolah dan frekuensi kunjungan ke fasilitas kesehatan menjadi ukuran keberhasilan jangka pendek. Sementara itu, dampak kualitatif mencakup perubahan persepsi, motivasi, dan perilaku penerima manfaat (Arlina & Nain, 2021). Evaluasi juga perlu memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi dan kemampuan keluarga keluar dari ketergantungan terhadap bantuan (Haliim & Hakim, 2024).

Tantangan dalam Pelaksanaan PKH

Beberapa studi mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan PKH, antara lain keterbatasan anggaran operasional, prosedur administratif yang rumit, serta akses terbatas di daerah terpencil (Kusuma et al., 2024). Di Kabupaten Bekasi, tantangan ini semakin kompleks mengingat wilayah tersebut merupakan daerah urban-industrial dengan disparitas pembangunan antar wilayah yang cukup tinggi (Adeng, 2014; Abdussamad et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di Kabupaten Bekasi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap persepsi penerima manfaat serta dampak yang dirasakan oleh mereka setelah mengikuti program. Meskipun tidak menggunakan teknik analisis statistik inferensial, penelitian ini memanfaatkan angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menggali pola-pola yang muncul terkait efektivitas program. Pengambilan data dilakukan di lima desa yang terletak di Kabupaten Bekasi, yang masing-masing telah menjadi lokasi pelaksanaan PKH selama minimal tiga tahun terakhir. Pemilihan desa dilakukan dengan teknik purposive sampling, berdasarkan keberagaman sosial-ekonomi, aksesibilitas, serta kesediaan dan kerjasama aparaturnya dalam mendukung penelitian ini.

Responden yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama:

1. Penerima Manfaat (KPM), yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga dari keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, khususnya yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi.
2. Pendamping Sosial PKH, yang bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan di tingkat lapangan dan mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Secara keseluruhan jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 60 orang, yang terdiri dari 50 KPM dan 10 pendamping sosial. Jumlah tersebut dianggap memadai untuk menggambarkan persepsi umum terhadap efektivitas PKH di wilayah tersebut, dengan pendekatan yang bersifat eksploratif dan mendalam.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket yang terbagi dalam dua jenis: angket tertutup dan angket terbuka. Instrumen angket ini dirancang untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang akan menggambarkan efektivitas PKH berdasarkan empat indikator utama: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelaksanaan program.

1. Angket Tertutup berisi serangkaian pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan, menggunakan skala Likert 1–5. Angket ini bertujuan untuk mengukur persepsi responden mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan efektivitas program PKH, yang meliputi:
 - a. Efektivitas pendidikan: Mengukur apakah bantuan PKH berkontribusi pada kelanjutan pendidikan anak-anak dan perlengkapan sekolah mereka.
 - b. Efektivitas kesehatan: Mengukur sejauh mana penerima manfaat mematuhi jadwal pemeriksaan kesehatan rutin dan memanfaatkan layanan kesehatan dasar.
 - c. Efektivitas ekonomi: Mengukur penggunaan dana bantuan dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
 - d. Pelaksanaan program: Mengukur pemahaman terhadap aturan dan prosedur program serta kepuasan terhadap pendampingan sosial.
2. Angket Terbuka memberikan kesempatan bagi responden untuk memberikan komentar atau penjelasan lebih lanjut terkait pengalaman mereka dalam mengikuti program. Data kualitatif yang diperoleh dari angket terbuka ini sangat berguna untuk menggali lebih dalam mengenai dampak sosial dan psikologis dari PKH.

Angket ini disebarakan langsung oleh peneliti dengan bantuan pendamping sosial, baik dalam bentuk pertemuan kelompok maupun kunjungan rumah tangga. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap responden memahami setiap pertanyaan dengan baik dan memberikan jawaban yang akurat serta jujur.

Selain pengumpulan data primer melalui angket, penelitian ini juga mengandalkan studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder terkait pelaksanaan PKH. Dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, seperti laporan kinerja pendamping sosial, rekapitulasi kegiatan bulanan, dan pedoman teknis pelaksanaan program, digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai implementasi program dan mendukung validitas hasil yang diperoleh.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari angket tertutup dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Proses analisis ini melibatkan perhitungan distribusi frekuensi dan persentase jawaban yang diberikan oleh responden. Hasil analisis kuantitatif ini memberikan gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap efektivitas PKH dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Sementara itu, data yang diperoleh dari angket terbuka dan studi dokumentasi dianalisis secara tematik. Pendekatan tematik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam narasi responden, serta memberikan wawasan lebih dalam mengenai pengalaman dan persepsi mereka terhadap program PKH. Analisis kualitatif ini juga membantu untuk menggali aspek-aspek yang tidak dapat diukur melalui angket tertutup.

Kombinasi antara analisis kuantitatif dan kualitatif ini kemudian diolah secara interpretatif untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan menyeluruh mengenai efektivitas PKH. Triangulasi data dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dengan membandingkan temuan dari angket, narasi terbuka, dan dokumen administratif. Hal ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan mencerminkan kenyataan yang ada di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berhasil menggali banyak hal terkait efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada penerima manfaat (KPM) dan pendamping sosial, serta wawancara terbuka yang memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman, terlihat jelas bagaimana program ini berperan dalam meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, namun juga mengungkap beberapa tantangan yang masih perlu diperbaiki. Arlina & Nain (2021) mengatakan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap partisipasi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, dan secara keseluruhan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh penerima manfaat, lebih dari 75% merasa bahwa bantuan PKH cukup berperan dalam memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah. Ini tercermin dari meningkatnya tingkat keberlanjutan pendidikan anak, terutama di kalangan keluarga yang sebelumnya menghadapi kendala finansial. Banyak ibu rumah tangga yang mengungkapkan bahwa tanpa bantuan ini, mereka mungkin harus memutuskan untuk

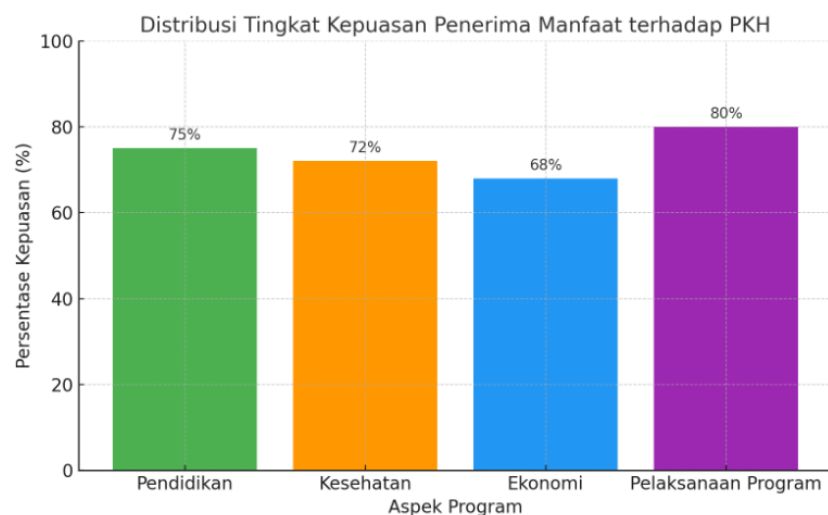
menghentikan pendidikan anak-anak mereka karena biaya sekolah yang terus meningkat. Namun, meskipun sebagian besar merasa terbantu, ada juga responden yang merasa bahwa bantuan tersebut masih kurang. Mereka mengungkapkan bahwa biaya yang diberikan masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pembelian alat tulis atau biaya transportasi yang semakin tinggi. Dalam beberapa kasus, kendala utama adalah jarak yang jauh ke sekolah atau kurangnya fasilitas pendidikan lainnya yang membutuhkan teknologi seperti computer, HP untuk mengakses komunikasi dengan media pembelajarana atau sekedar komunikasi di grup sekolah.

Dalam hal kesehatan, banyak responden yang merasa bahwa PKH cukup mendorong mereka untuk lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, baik untuk ibu hamil maupun balita. Sebanyak 72% responden mengatakan bahwa mereka rutin mengikuti jadwal Posyandu, dan sebagian besar merasa bahwa pemeriksaan kesehatan tersebut penting bagi tumbuh kembang anak mereka. Namun, masalah utama yang ditemukan adalah keterbatasan akses ke layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang cukup jauh dari pusat kesehatan. Beberapa ibu mengungkapkan bahwa meskipun mereka ingin memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, mereka harus menempuh jarak yang jauh, tidak adanya transportasi yang memadai, antrean cukup panjang dan melelahkan sehingga sering kali harus melewatkan jadwal pemeriksaan atau mengurangi frekuensi kunjungan.

Dalam hal ekonomi, banyak penerima manfaat yang mengungkapkan bahwa dana PKH sangat membantu mereka sebanyak 68 % mengaku bahwa dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti membeli pangan dan membayar kebutuhan rumah tangga lainnya. Responden menyatakan bahwa meskipun dana ini cukup membantu, mereka masih merasa ada ketidakcukupan dalam menghadapi kebutuhan yang lebih besar, seperti biaya kesehatan atau biaya pendidikan anak yang tak terduga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PKH dapat meringankan beban ekonomi dalam jangka pendek, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan penyesuaian jumlah bantuan yang diberikan agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi keluarga, apalagi dengan adanya inflasi yang terus meningkat.

Dari sisi pelaksanaan program, sekitar 80 % penerima manfaat merasa puas dengan peran pendamping sosial yang aktif memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Pendamping sosial di lapangan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penerima manfaat mendapatkan informasi yang tepat tentang program, serta membantu mereka menyelesaikan masalah administratif yang mungkin timbul. Namun, beberapa responden juga mengungkapkan bahwa prosedur administratif yang terkadang kompleks masih menjadi kendala, yang memerlukan penyederhanaan agar penerima manfaat tidak merasa bingung.

Sebagian besar pendamping sosial juga menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan program adalah keterbatasan waktu dan aksesibilitas, terutama bagi keluarga yang tinggal di lokasi yang cukup jauh atau terisolasi. Salah satu temuan menarik yang muncul dari angket terbuka adalah bahwa banyak responden merasa lebih dihargai dan diakui oleh pemerintah karena adanya PKH. Mereka merasa program ini bukan hanya tentang bantuan finansial, tetapi juga tentang pengakuan terhadap usaha mereka dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Namun, program ini juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan, yang mengarah pada kesenjangan antara keluarga yang lebih mampu mengakses program dan mereka yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala dan memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang lebih terpencil.



Gambar 1. Hasil survei ke 4 aspek program

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bekasi memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mayoritas penerima manfaat merasa terbantu oleh bantuan yang diberikan, terutama dalam memastikan kelangsungan pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. PKH juga mendorong kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan balita.

Namun, meskipun memberikan manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program ini. Beberapa penerima manfaat merasa bahwa jumlah bantuan yang diberikan masih kurang, terutama dalam menghadapi biaya pendidikan atau kesehatan yang tidak terduga. Selain itu, aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi masalah, terutama bagi keluarga yang tinggal di daerah terpencil.

Pelaksanaan program juga menunjukkan adanya kendala administratif yang perlu disederhanakan untuk memudahkan penerima manfaat. Keterbatasan waktu dan aksesibilitas bagi pendamping sosial di lapangan juga menjadi tantangan dalam memastikan distribusi bantuan yang merata.

Meski demikian PKH memberikan dampak sosial yang positif dengan meningkatkan pengakuan terhadap usaha keluarga miskin dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Sehingga untuk mencapai hasil yang lebih optimal, perlu ada evaluasi berkala dan penyesuaian bantuan agar lebih relevan dengan kondisi keluarga, serta perhatian lebih kepada daerah yang sulit dijangkau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para informan dan aparat desa di Kabupaten Bekasi yang telah menyediakan waktu dan informasi penting dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., SIK, M. S., & Patta Rapanna, S. E. (2023). *Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik: The Vircle Of Poverty from A Public Service Perspective*. Syakir Media Press.
- Adeng, A. (2014). Sejarah Sosial Kota Bekasi. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(3), 397-412.
- Amanda, O. (2022). Peran Kepemimpinan pada Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 7(2), 55-62.
- Arlina, M. G., & Nain, U. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi Kasus: PKH Bidang Pendidikan). *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 9(2), 70-80.
- Beni, S., & Manggu, B. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9(2), 162-170.
- Haliim, W., & Hakim, A. I. (2024). KETERGANTUNGAN MASYARAKAT MISKIN DAN DILEMA KEBIJAKAN SOSIAL: STUDI PADA IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 97-112.
- Jaka Sriyana, S. E., Abdul Hakim, S. E., & Akhsyim Afandi, M. A. (2021). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.

- Kusuma, A. M., Wahyuni, I., & Widjasena, B. (2024). Hubungan Job Demand, Job Control, Dukungan Sosial dan Faktor Individu Terhadap Stres Kerja pada Pendamping Sosial PKH Kota Bekasi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 53-58.
- Maulana, I. R. (2023). Kesenjangan sosial dalam distribusi kekayaan: Tantangan bagi pembangunan berkelanjutan. *literacy notes*, 1(2).
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184-192.
- Nuraida, N. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 148-165.
- Rahman, H. (2017). Potret pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia dalam tinjauan ekonomi politik pembangunan. *Ilmu dan Budaya*, 40(55).
- Setyawardani, D. T. R., Paat, C. J., & Lesawengen, L. (2020). Dampak bantuan PKH terhadap masyarakat miskin di kelurahan Bumi Nyiur kecamatan Wanea kota Manado. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Wahyudi, A., Handoyo, P., & Sudrajat, A. (2016). Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Universitas Negeri Surabaya.
- Wahyuni, W., Dwiarto, R., Suwarno, R. S., & Giyanto, B. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 11-22.